

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT  
PADA BTPN MITRA USAHA RAKYAT  
CABANG PEMATANGSIANTAR**

**TESIS**

**OLEH**

**MUSA FERNANDO SILAEN**

**NPM :1520050037**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)  
MEDAN  
2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MUSA FERNANDO SILAEN  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1520050037  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA BTPN MITRA USAHA RAKYAT CABANG PEMATANGSIANTAR

Disetujui untuk disampaikan kepada

*Panitia Ujian Tesis*

Medan, 5 April 2018

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.SI, QIA., Ak., CA.CPAL      Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.SI

**PENGESAHAN**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA BTPN MITRA  
USAHA RAKYAT CABANG PEMATANGSIANTAR**

**MUSA FERNANDO SILAEN**

**NPM : 1520050037**

**Konsentrasi : Akuntansi Manajemen**

" Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,  
yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar  
Magister Akuntansi (M.Ak.)"  
Pada Hari Kamis, 5 April 2018

**Panitia Penguji**

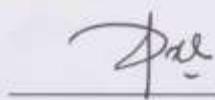
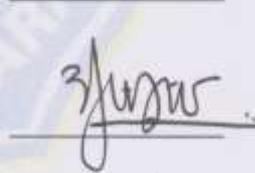
1. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si, QIA., Ak., CA,CPAI.  
Ketua

2. Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si  
Sekretaris

3. Dr. IRFAN, S.E., M.M  
Anggota

4. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si, Ak, CA.  
Anggota

5. Hj. HAFSAH, S.E., M.Si  
Anggota



### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian tesis ini bukan karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, April 2018  
Penulis



  
MUSA FERNANDO SILAEN  
1520050037

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT  
PADA BTPN MITRA USAHA RAKYAT  
CABANG PEMATANGSIANTAR**

**ABSTRAK**

**Musa Fernando Silaen  
NIM : 1520050037**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Pematangsiantar. Porsedur pemberian kredit disusun mulai dari tahapan permohonan, analisa, rekomendasi, persetujuan, peingatan dan pencairan kredit. Sistem pengendalian internal pemberian kredit memiliki 5 (lima) konseptual yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar. Data yang digunakan adalah data primer yang digunakan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit melalui wawancara dan data sekunder yaitu buku pedoman pemberian kredit.

Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar tidak dilakukan sepenuhnya. Sistem pengendalian internal pemberian kredit yang tidak dilakukan yaitu aktivitas pengendalian dan pemantauan melalui prinsip 5C pemberian kredit diantaranya yaitu kemampuan dan tujuan permohonan. Dengan tidak dialkukannya sistem pengendalian internal pemberian kredit sepenuhnya, maka sistem pengendalian internal kredit di BTPN MUR Cabang Pematangsiantar tidak tercapai sesuai dengan tujuannya.

**Kata Kunci :** Sistem Pengendalian Internal, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan, Porosedur Pemberian Kredit.

**INTERNAL CONTROL SYSTEMS CREDIT GIVING  
ON BTPN MITRA USAHA RAKYAT  
PEMATANGSIANTAR BRANCH**

**ABSTRACT**

**Musa Fernando Silaen  
NIM : 1520050037**

This study aims to determine the implementation of internal control system of credit provision at BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) of Pematangsiantar Branch. Loan disbursement procedures are prepared from the stages of application, analysis, recommendations, approval, reminder and disbursement of credit. The internal credit control system has 5 (five) conceptual namely controlling environment, risk assessment, controlling activity, information and communication, and monitoring.

.The type of this research is descriptive qualitative that is describing internal control system of credit giving to BTPN MUR of Pematangsiantar Branch. The data used is the primary data used to determine the implementation of internal credit control system through interviews and secondary data is the guidance book of credit.

The final results of this study indicate that the implementation of internal control system of credit provision in BTPN MUR Pematangsiantar Branch not done completely. Internal credit control system that is not performed is the control and monitoring activities through the principle of 5C crediting such as the ability and the purpose of the request. With the absence of a complete internal credit control system, the internal credit control system at BTPN MUR of Pematangsiantar Branch is not achieved in accordance with its objectives.

**Keywords:** Internal Control System, Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring, Procedure of Crediting

## KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah (UMSU) Sumatera Utara. Maka dalam penulisan tesis ini, penulis memilih judul **“Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Pematangsiantar”**.

Penulis menyadari bahwa isi dari penulisan tesis ini masih kurang sempurna. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis dalam pengelolaan di bidang perkreditan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis tidak dapat berbuat banyak tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan rasa tulus penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sangat dalam kepada oran tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya yaitu Mama saya tercinta Ance Br. Pardede (Op. Ridho) dan terimakasih atas perhatian, doa dan dukungannya selama saya kuliah. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPAI., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk bimbingan, mengarahkan dan membina penulis dengan penuh kesabaran sehingga terwujudnya penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhyarsyah. S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan petunjuk, perbaikan, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Irfan. S.E., M.M., selaku Dosen Penguji I dalam penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan arahan, perbaikan, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari. S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Penguji II dalam penulisan tesis ini yang juga telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis.
7. Ibu Hj. Hafsah. S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji III dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak Josh Iswadi Sinurat, selaku Branch Manager BPTN Mitra Usaha Rakyat Cabang Pematangsiantar yang memberikan ijin dalam meneliti di BTPN MUR Cabang Pematangsiantar.

9. Bapak Dr. Darwin Lie, S.E., M.M., selaku Ketua STIE Sultan Agung Pematangsiantar yang memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti Program Pascasarjana ini.
10. Seluruh dosen/staf pengajar serta pegawai tata usaha Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh dosen/staf pengajar serta pegawai tata usaha STIE Sultan Agung Pematangsiantar
12. Seluruh Staf dan Karyawan BTPN Mitra Usah Rakyat Cabang Pematangsiantar.
13. Kepada keluarga besar yang saya cintai, Betaria Br. Silaen, Fitri Della Br. Silaen dan Peppy Manumpak Silaen, terima kasih atas doa dan dukungannya.
14. Khusus saya ucapkan juga terimakasih yang sangat besar kepada abang saya Marisi Butar-butar, S.E., M.M. (Cand. Doktor), yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.
15. Terimakasih buat Katrin Sianipar tempat curahan hati penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang sangat dalam kepada penulis
16. Terimakasih kepada naboru saya Marintan Br. Silaen yang selalu memberikan doa dan dukungan selama saya menjalani perkuliahaan sampai dengan penulisan tesis ini.
17. Sahabat-sahabat angkatan sarjana penulis, Torang Ambarita, S.E., Damayanti Napitupulu, S.E., Juliana Marbun, S.E., yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

18. Terimakasih kepada Kak Linda Rumapea yang memberikan semangat dan doa serta membantu saya dalam mencari buku terkait tesis ini.
19. Sahabat-sahabat penulis angkatan Magister Akuntansi Tahun 2015 yang sama-sama sedang menyelesaikan studi Program Pascasarjana, yang telah memberikan semangat dan doa serta motivasi selama penyusunan proposal tesis ini.
20. Sahabat-sahabat di BTPN Mitra Bisnis Area Pematangsiantar yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
21. Sahabat HDK Panin Bank yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Pematangsiantar, April 2018  
Penulis,

**Musa Fernando Silaen**  
**1520050037**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Keaslian Penelitian .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Sistem Pengendalian Internal .....	11
a. Definisi Sistem Pengendalian Internal .....	11
b. Tujuan Pengendalian Internal .....	13
c. Komponen Sistem Pengendalian Internal .....	15
d. Keterbatasan Pengendalian Internal .....	20
2. Pengendalian Internal Perkreditan .....	25
a. Pengertian Pengendalian Internal Kredit.....	25

b.	Prinsip dan Tujuan Internal Kredit .....	26
c.	Sistem dan Jenis Pengendalian Kredit .....	28
d.	Penerapan Pengendalian Internal Dalam Bidang Perkreditan .....	29
3.	Kredit .....	35
a.	Pengertian Kredit .....	35
b.	Unsur-Unsur Kredit .....	36
c.	Tujuan Kredit .....	38
d.	Fungsi Kredit .....	40
e.	Jenis-Jenis Kredit .....	43
f.	Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit .....	48
g.	Aspek-Aspek Dalam Pemberian Kredit .....	52
h.	Prosedur Pemberian Kredit .....	55
i.	Kualitas Kredit .....	60
B.	Kerangka Berpikir .....	65
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A.	Pendekatan Penelitian .....	67
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	68
C.	Definisi Operasional .....	69
D.	Jenis dan Sumber Data.....	71
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	71
F.	Teknik Analisa Data .....	72

BAB IV	HASIL DAN PENELITIAN .....	75
A.	Hasil Penelitian .....	75
1.	Gambaran Umum BTPN MUR Cabang Pematangsiantar .....	75
2.	Prosedur Pemberian Kredit Pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar .....	76
a.	Tahap Permohonan .....	76
b.	Penyelidikan dan Analisis Kredit.....	78
c.	Rekomendasi Kredit .....	83
d.	Persetujuan Kredit .....	84
e.	Pengikatan Kredit .....	86
f.	Pencairan Kredit .....	86
B.	Pembahasan .....	88
1.	Lingkungan Pengendalian ( <i>Control Environment</i> ) .....	88
2.	Penaksiran Risiko ( <i>Risk Assessment</i> ).....	92
3.	Aktivitas Pengendalian ( <i>Control Activities</i> ) .....	93
4.	Informasi dan Komunikasi ( <i>Information and Communication</i> ).....	95
5.	Pemantauan ( <i>Monitoring</i> ) .....	97
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	100
A.	Kesimpulan .....	100
B.	Saran .....	101
	DAFTAR PUSTAKA .....	102
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I-1	Sales and Loan Quality BTPN MUR Cabang Pematangsiantar 5
Tabel II-1	Kajian Penelitian Terdahulu ..... 62
Tabel III-1	Rencana Waktu Penelitian ..... 68
Tabel IV-1	Skema Ketentuan Produk BTPN Mitra Usaha Rakyat..... 78
Tabel IV-2	Skema Ketentuan Kolektibilitas BTPN Mitra Usaha Rakyat... 80

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II-1 Kerangka Berpikir .....	66
Gambar IV-1 Proses Kredit BTPN Mitra Usaha Rakyat .....	87

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah mengarahkan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi sebagai usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Di antara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah. Peranan bank dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena bank memberikan jasa dalam lalu lintas peredaran uang.

Berdasarkan Undang-undang RI No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan menyalurkan dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit merupakan keuntungan utama bisnis bank. Sehingga alokasi

dana yang terpenting tersebut adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau kredit berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank.

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*”, yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan.

Muchdarsyah Sinungan (1993, hal.2) menyatakan kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Kegiatan perkreditan bank selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan sangat erat dengan tingkat kesehatan bank. Sistem Pengendalian Internal (SPI) sangat penting didalam penyaluran kredit bank untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.

Mulyadi, (2002, hal. 165), menyatakan pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga keekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektifitas operasi.

Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) yang dikutip oleh Boynton, dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2003, hal.373), mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Seperti yang dikutip oleh Boynton, dkk dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2003, hal. 374) menyatakan untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- 2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
- 3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
- 4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
- 5) Pemantauan (*Monitoring*)

Bank didalam memberikan kredit memiliki sistem dan prosedur untuk mencegah dan menekan terjadinya risiko dalam pemberian kredit.

Sistem dan prosedur pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisa kredit. Untuk melaksanakan analisa kredit terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam memberikan kredit secara sehat. Prinsip-prinsip tersebut adalah "*the Five C of credit analysis*" atau prinsip 5 C yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit. Prinsip ini terdiri dari *character* (penilaian watak), *capacity* (penilaian kemampuan), *capital* (penilaian terhadap modal), *collateral* (penilaian terhadap agunan), dan *condition* (penilaian terhadap prospek usaha debitur).

Pengelolaan perkreditan yang baik menunjukkan manajemen mencapai tujuan dari pengendalian tersebut. Malayu S.P. Hasibuan, (2002, hal.105), menyatakan tujuan pengendalian internal kredit antara lain adalah untuk:

- 1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- 2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- 3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- 4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.

- 6) Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- 7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank

Berdasarkan pengamatan peneliti dapat dilihat bahwa Bank BTPN melalui salah satu cabangnya yaitu BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Pematangsiantar tergabung dalam regional Wilayah Sumatera Utara yang memiliki fokus produk pinjaman kredit kecil. Bank BTPN adalah salah satu bank yang memiliki beberapa debiturnya mengalami kredit bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari tabel *Sales and Loan Quality* BTPN MUR Cab. Pematangsiantar pada Tahun 2014 s/d Tahun 2016.

**Tabel I-1**  
***Sales and Loan Quality***  
**BTPN MUR Cab. Pematangsiantar**  
**Tahun 2014-2016**

Tahun	MTD Disb		Outstanding		MTD Growth	RR	NPL	CTX	COC MTD	Yield	Wo ACT	Recov ACT
	No A	Amt	No A	O/S								
2014	14	689	220	23.726	54	92,47 %	1,59 %	0,10 %	-132	22,08%	87	252
2015	12	1.139	279	28.236	212	91,54 %	0,52 %	0,60 %	-60	21,69%	0	-6
2016	7	802	310	30.125	-89	93,11 %	1,91 %	0,60 %	-15	20,79%	52	1

Dari tabel diatas terlihat pada pertumbuhan dan kualitas kredit BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dari Tahun 2014 s/d Tahun 2016. Target pertumbuhan kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar menurut Unit Manager tidak mencapai kepada target yang diinginkan oleh perusahaan dikarenakan pihak manajemen semakin hati-hati untuk menyetujui kredit yang

diajukan. Hal ini disebabkan bertumbuhnya kredit bermasalah atau kredit macet setiap tahunnya, sehingga *Relationship Officer* (RO) atau marketing kredit lebih di fokuskan untuk menangani kredit yang bermasalah.

Kenaikan NPL yang terjadi disebabkan oleh pihak bank maupun nasabah BTPN MUR Cabang Pematangsiantar. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BTPN MUR Cab. Pematangsiantar. Dimana pihak bank tidak melakukan sepenuhnya komponen sistem pengendalian internal.

Komponen pengendalian internal yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh BTPN MUR Cabang Pematangsiantar meliputi yaitu aktivitas pengendalian (*control activities*) dimana prosedur dalam menganalisa kredit melalui prinsip 5C untuk kapasitas (*capacity*) dan metode 7P untuk tujuan permohonan kredit (*purpose*) tidak dilakukan secara maksimal dan pemantauan (*monitoring*) yaitu melakukan kunjungan untuk memantau perkembangan usaha debitur tidak dilakukan secara berkala. Sehingga tujuan dari pengendalian internal yang diharapkan perusahaan dalam perkreditan tidak tercapai sesuai harapan perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Pematangsiantar ”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) yaitu prosedur, dalam menganalisa kredit melalui prinsip 5C untuk kapasitas (*capacity*) dan metode 7P untuk tujuan permohonan kredit (*purpose*) tidak dilakukan sepenuhnya.
2. Pemantauan (*Monitoring*) yaitu melakukan kunjungan untuk memantau perkembangan usaha debitur tidak dilakukan secara berkala.
3. Tujuan pengendalian internal perkreditan yaitu mendorong ditaatinya kebijakan majemen untuk melaksanakan prosedur dan peraturan belum tercapai sesuai harapan perusahaan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan SPI pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar?
2. Apakah penerapan SPI pemberian kredit sudah mencapai tujuan SPI pemberian kredit tersebut pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar.
2. Untuk menganalisis tercapainya tujuan SPI tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi berbagai pihak yang akan melakukan penelitian sejenis dan menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan penerapan sistem pengendalian dan prosedur pemberian kredit dalam meminimalkan risiko kredit.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka peningkatan dalam mengurangi kredit bermasalah pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit. Perbedaan dari penelitian ini terletak

pada objek penelitiannya yaitu pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dan waktu pada data yang digunakan peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruzzanna Amanina (2011) dengan judul Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Majapahit Semarang). Perbedaan dari hasil penelitian mendeskripsikan hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian intern, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu jumlah Mikro Kredit Analis (MKA) pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang kurang memadai dibanding tingginya aplikasi permohonan kredit yang masuk sehingga dikhawatirkan terjadi kerugian akibat dari kualitas kredit yang lemah. Selain itu, pelaksanaan kunjungan atau *on the spot* yang dilakukan, tidak sesuai dengan tata cara dalam Manual Produk Kredit Mikro. Perbedaan dari penelitian ini

Penelitian selanjutnya oleh Novianty (2012) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perbedaan dari hasil penelitian mendeskripsikan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemberian kredit UKM dan SPI yaitu perjanjian kredit dilakukan secara bawah tangan, ada penumpukan tugas pada fungsi AO, pengawasan fungsi operasional unit belum optimal.

Penelitian selanjutnya oleh Nadia Maya Sari Dewi (2012) dengan judul Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang. Perbedaan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan yang mengalami pengembalian macet tidak disebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan melainkan karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun nasabah yaitu faktor lingkungan dan faktor keadaan nasabah.

Penelitian selanjutnya oleh Riska S. Papalangi (2013) dengan judul Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado. Perbedanaa dari hasil penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian internal dalam perkreditan dapat mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan penerapan persyaratan tertentu dapat menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Sistem Pengendalian Internal**

###### **a. Definisi Sistem Pengendalian Internal**

Suatu perusahaan menyusun sistem pengendalian internal dalam rangka untuk membantu dalam proses pencapaian tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijadikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mulyadi, (2002, hal. 165), menyatakan pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga keekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektifitas operasi.

Sukrisno Agoes, (2012, hal.79), menyatakan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) yang dikutip oleh Boynton, dkk. dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing*, (2003, hal.373), mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Dalam laporan *Committe of Sponsoring Organizations* (COSO) juga menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam definisi berikut:

- 1) Pengendalian internal merupakan suatu proses. Ini berarti alat untuk mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri. Pengendalian internal terdiri dari serangkaian tindakan yang meresap terintegrasi dengan, tidak ditambahkan ke dalam, infrastruktur suatu entitas.
- 2) Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya suatu manual kebijakan dan formulir-

formulir, tetapi orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya.

- 3) Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian.
- 4) Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

#### **b. Tujuan Pengendalian Internal**

Sawyer, ddk. (2005, hal.62), menyatakan bahwa tujuan-tujuan umum yang akan dicapai dari pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan susunan, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta kualitas barang dan jasa sesuai misi organisasi.
- 2) Mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat pelepasan, penyalahgunaan, kesalahan pengelolaan, kekeliruan, dan kecurangan.
- 3) Meningkatkan kepatuhan pada hukum dan arahan manajemen.

- 4) Membuat data keuangan dan manajemen yang dapat diandalkan serta pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat.

Indra Bastian, (2000, hal.154), menyatakan tujuan dari pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya.

Aktiva organisasi bias dicuri, dirusak atau disalahgunakan secara sengaja atau tidak sengaja. Demikian juga untuk aktiva tidak nyata seperti dokumen, surat berharga dan catatan keuangan, pengendalian internal dibentuk untuk mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

- 2) Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi. Pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat.

- 3) Meningkatkan efisiensi usaha bank

Pengendalian intern dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha, termasuk pencegahan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

- 4) Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian intern memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Mulyadi (2002 : 178), menyatakan tujuan dari pengendalian intern terbagi atas dua yaitu:

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan
  - a) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
  - b) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya.
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
  - a) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan,
  - b) Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan.

### **c. Komponen Pengendalian Internal**

Seperti yang dikutip oleh Boynton, dkk. dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing*, (2003, hal. 374) menyatakan untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak

kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Menetapkan suasana suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.

Sejumlah faktor pembentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Dewan direksi dan komite audit
- d) Filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen
- e) Struktur organisasi
- f) Penetapan wewenang dan tanggung jawab
- g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2) Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan

entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penilaian harus mencakup semua risiko yang dihadapi. Baik risiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*), yang meliputi risiko kredit, risiko hukum, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko *strategic*, dan risiko kepatuhan.

3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang memberikan arah bagi manajemen, seperti: proses ketaatan pada ketentuan tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Aktivitas pengendalian merupakan bagian yang menyatu atau integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengkajian

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

### 5) Pemantauan (*Monitoring*)

Merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu.

Sukrisno Agoes, (2012, hal.100), menyatakan adapun uraian dari pengertian unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut:

#### 1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.

Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal :

- a) Integritas dan nilai etika,
- b) Komitmen terhadap kompetensi,
- c) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit,
- d) Falsafah manajemen dan gaya operasi,
- e) Struktur organisasi,
- f) Pemberian wewenang dan tanggung jawab,
- g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

#### 2) Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- a) Perubahan dalam lingkungan operasi,
- b) Personel baru,
- c) Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki,
- d) Teknologi baru,
- e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru,
- f) Restrukturisasi korporasi,
- g) Operasi luar negeri,
- h) Standar akuntansi baru.

### 3) Aktivitas Pengendalian

Bahwa aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- a) Review terhadap kinerja,
- b) Pengolahan informasi,
- c) Pengendalian fisik,
- d) Pemisahan tugas.

### 4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan

pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan.

#### 5) Pemantauan

Bahwa pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

### **d. Keterbatasan Pengendalian Internal**

Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai bukan mutlak kepada manajemen dan dewan direksi berkenaan dengan pencapaian tujuan entitas.

Sukrisno Agoes, (2012, hal.106), menyatakan bahwa terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian

internal entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana.

Boynton, dkk. dalam bukunya yang berjudul *Modern Auditing* (2003, hal. 375), menyatakan *Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit* mengidentifikasi keterbatasan yang melekat berikut yang menjelaskan mengapa pengendalian internal sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas. Keterbatasan pengendalian internal yaitu:

1) Kesalahan dalam pertimbangan

Kadang-kadang, manajemen dan personil lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya.

2) Kemacetan

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personil personil salah memahami instruksi atau

membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

### 3) Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal (misalnya, kolusi antara tiga karyawan mulai dari departemen personil, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif, atau skedul pembayaran kembali antara seorang karyawan dalam departemen pembelian dan pemasok atau antara seorang karyawan di departemen penjualan dengan pelanggan).

### 4) Penolakan manajemen

Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan (misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau

menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan). Praktik penolakan termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

#### 5) Biaya versus manfaat

Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

Mulyadi, (2002, hal.181), menyatakan bahwa pengendalian internal yang baik sekalipun, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan sebagai berikut:

##### 1) Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

## 2) Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

## 3) Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

## 4) Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

## 5) Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pengendalian internal memiliki keterbatasan yang menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian berarti bahwa penerapan pengendalian internal bukan ditujukan untuk menghilangkan semua kecurangan dan kesalahan yang terjadi, melainkan menguranginya seminimal mungkin, sehingga apabila terjadi kecurangan dan kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat dan baik.

## **2. Pengendalian Internal Perkreditan**

### **a. Pengertian Pengendalian Internal Kredit**

Penerapan pengendalian internal harus dapat mendorong terciptanya operasi yang efektif dan efisien, sistem pelaporan keuangan yang handal dan pemenuhan perundangan, peraturan serta kebijakan bank. Penyusunan pengendalian internal harus mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bank.

Suhardjono, (2003, hal.81), menyatakan bahwa bank harus menerapkan pengendalian internal yang dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap hal-hal yang dapat merugikan bank serta terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat.

Malayu S.P. Hasibuan, (2002, hal.105), menyatakan pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar.

#### **b. Prinsip dan Tujuan Internal Kredit**

Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsur-unsur pengendalian internal berupa penelaahan dan penekanan pada tujuan pengendalian yang ingin dicapai perusahaan.

Azhar Susanto dan La Midjan, (1994, hal.355), menyatakan pengendalian internal kredit memuat prinsip-prinsip berikut:

- 1) Perlu adanya pemisahan fungsi antara:
  - a) Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit.

- b) Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau administrasi kredit.
  - c) Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit.
- 2) Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana dengan kredit.
  - 3) Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan.
  - 4) Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan administratif.
  - 5) Perlu diciptakan peraturan-peraturan internal yang akan menjamin keamanan atas kelayakan, baik bersifat preventif maupun represif.
  - 6) Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat.
  - 7) Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pemberian kredit berikut rekening-rekening giro, kredit, dan lain-lain secara baik (*filling system*).

Malayu S.P. Hasibuan, (2002, hal.105), menyatakan tujuan pengendalian internal kredit antara lain adalah untuk:

- 1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- 2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- 3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.

- 4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- 6) Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- 7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank

**c. Sitem dan Jenis Pengendalian Kredit**

Malayu S.P, Hasibuan, (2002, hal.106), menyatakan sistem pengendalian kredit antara lain :

- 1) *Internal control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- 2) *Audit control of credit* adalah sistem pengendalian dan penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
- 3) *External control of credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Adapun jenis-jenis pengendalian kredit :

#### 1) *Preventive Control of Credit*

adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive Control of Credit* dilakukan dengan cara:

- a) Penetapan plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit.
- b) Pemantauan debitur.
- c) Pembinaan debitur.

#### 2) *Repressive Control of Credit*

adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur

### **d. Penerapan Pengendalian Internal dalam Bidang Perkreditan**

Pengendalian yang baik harus memiliki kemampuan. Dalam arti andal dan dapat menjamin bahwa dalam penyaluran perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat.

Veithzal Rivai, dkk., (2007, hal.509), menyatakan penerapan pengendalian internal di bidang perkreditan meliputi berbagai hal sebagai berikut:

*1) Division of duties*

Artinya, adanya pemisahan antara fungsi-fungsi administratif, operasional fungsi penyimpanan, dan dapat juga berupa pembagian tugas dan wewenang berdasarkan tingkat jabatan yang ada. Pemisahan fungsi, tugas, dan wewenang dimaksudkan agar tercapai internal check secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada.

*2) Dual control*

Adalah pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk menetapkan hal-hal berikut:

- a) Apakah petugas pertama telah bertindak sesuai dengan batas-batas wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya?
- b) Apakah transaksi yang telah terjadi tersebut telah dicatat, dibukukan, diadministrasikan dengan prosedur yang benar?
- c) Apakah transaksi yang terjadi tersebut telah diselesaikan dengan prosedur yang benar?

*3) Joint/dual custody*

Merupakan suatu sistem pengamanan penyimpanan folder jaminan kredit dengan menggunakan dua kunci pengaman dan formulir checklist. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Folder Jaminan Kredit disimpan di *strong room*, dimana kunci untuk masuk ke dalam ruangan dikuasai oleh operation manager, atau head teller.
- b) Di ruangan *strong room*, Folder Jaminan Kredit dimasukkan ke dalam *Filing Cabinet* yang mempergunakan kunci kombinasi yang dikuasai oleh *Loan Administration Supervisor*.
- c) Peminjaman atau pengembalian folder mempergunakan formulir checklist memo penyerahan/peminjaman dokumen.
- d) Setiap kali folder dipinjam dan dikembalikan harus mempergunakan satu formulir checklist diisi sesuai kebutuhan dan di-counter sign oleh dua pihak yaitu peminjam dan pengelola dalam hal ini Loan Administration dan dibubuhi tanggal peminjaman dan pengembalian.

#### 4) *Number controls*

Pengawasan internal dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran dokumen-dokumen pada kegiatan perkreditan

dengan tujuan untuk memudahkan pengecekan dan menghilangkan peluang tindakan manipulasi.

5) *Limitation outside activities of bank personnel*

Aktivitas karyawan di luar pekerjaannya sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitasnya dalam melaksanakan tugas. Internal auditor maupun para pejabat di cabang/kantor pusat dalam memantau kegiatan karyawan di luar pekerjaannya adalah bertujuan untuk memastikan hal-hal berikut:

- a) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang bersifat mencari keuntungan pribadi, misalnya melakukan pekerjaan part time pada kantor/instansi lain yang menimbulkan pertentangan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab selaku pejabat/pegawai bank.
- b) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan tugas kedinasan, tetapi mempergunakan fasilitas milik bank, seperti mempergunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.
- c) Pejabat/karyawan tidak terlibat pergaulan dengan kelompok-kelompok yang sering meresahkan masyarakat, seperti kelompok penjudi, premanisme, dan peminum minuman keras.

d) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang cenderung dan mengakibatkan dilanggarnya prinsip-prinsip kerahasiaan bank, dan kerahasiaan perusahaan.

6) *Rotation of duty assignment*

Mutasi pejabat bank mempunyai manfaat yang besar, baik bagi pejabat yang bersangkutan maupun bagi bank. Manfaat tersebut antara lain:

- a) Menghilangkan kejenuhan/kebosanan sebagai akibat bekerja secara rutin untuk jangka waktu yang relatif lama.
- b) Memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pada kegiatan yang lain sehingga apabila yang bersangkutan mendapatkan promosi untuk jabatan yang lebih tinggi, ia telah mempunyai kualitas (kecakapan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan).
- c) Menghindarkan seorang pejabat bank menguasai suatu pekerjaan secara terus menerus yang memungkinkannya menyembunyikan suatu manipulasi karena dengan adanya mutasi, berarti ada petugas pengganti apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan akan segera dapat dideteksi.
- d) Menduduki suatu jabatan terlalu lama membuat seseorang dapat membentuk suatu persekongkolan baik disengaja ataupun tidak.

e) Melalui mutasi tercipta adanya hubungan baik dengan para nasabah maupun pihak eksternal lainnya yang mengakibatkan timbulnya self dialing dan mengorbankan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, dapat diakhiri.

7) *Independence balancing*

Setiap petugas terutama petugas *Accounting Information Processing* di cabang harus memastikan bahwa sistem, prosedur, dan proses akuntansi telah berjalan sesuai norma-norma akuntansi, aktif memantau keseimbangan angka-angka laporan keuangan, serta lampiran-lampirannya

Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42.POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank menyatakan cakupan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), prosedur pemberian kredit atau pembiayaan, dan ketentuan intern bank.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan.
- 3) Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan

memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank.

- 4) Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 5) Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada bank.
- 6) Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu telah sesuai dengan KPB.
- 7) Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 8) Memantau kecukupan jumlah penyesihan penghapusan kredit atau pembiayaan.

### **3. Kredit**

#### **a. Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*”, yang artinya percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan.

Pengertian kredit menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992, menyatakan kredit adalah :

“penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Muchdarsyah Sinungan, (1993, hal.2), menyatakan kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Suhardjono, (2003, hal.11), menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam berkewajiban melunasi hitangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

## **b. Unsur-Unsur Kredit**

Kasmir, (2014, hal. 87), menyatakan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

### 1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

## 2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

## 3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

## 4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

## 5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Thomas. S, dkk., ( 1998, hal.14), menyatakan unsur-unsur kredit adalah sbagai berikut :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau

- jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
  - 3) *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari
  - 4) Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

### **c. Tujuan Kredit**

Thomas Suyatno, (1997, hal.15) menambahkan bahwa dengan mengacu pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara, tujuan kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Secara terinci dapat dikatakan tujuan kredit yang diberikan suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

- 1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan,
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi,
- 3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Kasmir, (2014, hal.88), menyatakan tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari keuntungan

Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.

- 2) Membantu usaha nasabah

Adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

- 3) Membantu pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a) penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank,

- b) membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan modal kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja,

- c) meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat,
- d) menghemat devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor dan terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor, apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

#### **d. Fungsi Kredit**

Kasmir (2014, hal.89), menyatakan fungsi kredit secara luas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah

yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6) Untuk meningkatkan keinginan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan keinginan/kemauan berusaha, apalagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Contoh : apabila kredit yang diberikan digunakan untuk membangun pabrik,

maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit antar negara akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

Thomas Suyatno, (2007, hal.16), menyatakan fungsi dari pemberian kredit yaitu :

1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut akan bermanfaat untuk menghasilkan barang jasa oleh penerima kredit.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan yang disebutkan diatas maka akan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Kredit yang diberikan oleh pihak pemberi kredit akan dapat digunakan oleh pihak peminjam untuk mengelola barang yang dapat bermanfaat. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Kredit pun dapat menambah atau

memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah liannya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi pihak pemberi kredit, pemberian kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha, begitu juga dengan pihak peminjam yang sedang mengalami kesulitan modal.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan berusaha

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara pihak-pihak pemberi pinjaman. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### **e. Jenis-Jenis Kredit**

Kasmir (2014, hal. 90), menyatakan secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

### 1) Dilihat Dari Segi Kegunaan

Maksud dari segi kegunaan adalah untuk melihat kegunaan uang tersebut apakah untuk digunakan kedalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan, seperti :

#### a) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya, untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

#### b) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji 13 pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

### 2) Di lihat dari segi tujuan kredit

#### a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit untuk mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Di lihat dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang dianjurkan si calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5) Dilihat dari segi sektor usaha

a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit peternakan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang ternak kambing atau sapi.

c) Kredit industri

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d) Kredit pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f) Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan

Merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h) Dan sektor-sektor lainnya.

#### **f. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan.

Kasmir (2014, hal.95), menyatakan penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut :

##### *1) Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar

belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, leadan keluarga, hoby, dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemampuan” membayar.

#### 2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

#### 3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

#### 4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu

masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

#### 1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

#### 2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

#### 3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain sebagainya.

#### 4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

#### 5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

#### 6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

### 7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **g. Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kredit**

Disamping menggunakan 5 C dan 7 P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Kasmir (2014, hal. 97), menyatakan aspek-aspek yang dinilai antarlain sebagai berikut:

#### 1) Aspek Yuridis/Hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan pengaju kredit. Penilaian ini dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian diteliti keabsahannya adalah seperti:

- a) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor perdagangan.
- b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.

- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e) Keabsahan surat-surat yang dijamin misal nya sertifikat tanah.

## 2) Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu dalam aspek ini adalah:

- a) pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu.
- b) rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau tahun yang akan datang;
- c) peta kekuatan pesaing yang ada;
- d) prospek secara keseluruhan.

## 3) Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain:

- a) Rasio-rasio keuangan

*b) Payback period*

*c) Net Present Value (NPV)*

*d) Profitability Index (PI)*

*e) Internal Rate of Return (IRR)*

*f) dan Break Event Point (BEP)*

#### 4) Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

#### 5) Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelolah berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

#### 6) Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti:

- a) meningkatkan ekspor barang;
- b) mengurangi pengangguran atau lainnya;
- c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d) tersedianya sarana dan prasarana;
- e) membuka isolasi daerah tertentu.

#### 7) Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap :

- a) tanah/darat menjadi gersang;
- b) air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa;
- c) udara mengakibatkan polusi, berdebu, bisning dan panas.

#### **h. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi pembeda mungkin terletak hanya terletak pada

prosedur dan persyaratan yang ditetapkan. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Kasmir (2014, hal. 100), menyatakan prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

1) Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain :

a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru, perluasan serta tujuan lainnya.

c) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian

besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir.

- d) Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam pengembalian kreditnya apakah dari hasil penjualan ataukah yang lainnya.
- e) Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik dengan unsur kesengajaan atau dengan tanpa unsur kesengajaan atau tidak. Biasanya jaminan kredit diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

(1) Akte Notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan.

(2) T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 (lima) tahun.

(3) N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak dimana sekarang ini setiap pemberian kredit harus dipantau oleh Bank Indonesia adalah nomor pokok wajib pajaknya.

- (4) Neraca dan laporan laba rugi terakhir,
- (5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan,
- (6) Foto kopi sertifikat jaminan.

## 2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas pinjaman sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank semua persyaratan telah terpenuhi maka pemberian kredit dapat dilanjutkan dan apabila belum dan setelah pemberitahuan berkas belum juga dilengkapi maka pemberian kredit dibatalkan.

## 3) Wawancara I

Wawancara ini merupakan kegiatan bank untuk mengetahui keinginan sebenarnya calon nasabah mengajukan kredit.

## 4) *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya tidak memberi tahu calon nasabah sebelumnya.

## 5) Wawancara ke II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan *on the spot* dilapangan.

#### 6) Keputusan Kredit

Keputusan Kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, yang mencakup :

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit
- c) Dan biaya-biaya yang harus dibayar

#### 7) Penandatanganan akad kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan :

- a) Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b) Dengan melalui notaris.

#### 8) Realisasi Kredit

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan.

#### 9) Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

### **i. Kualitas Kredit**

Hidup matinya suatu bang sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*), disamping penghasilan atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah.

Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin besar kualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 12 Ayat 3, menyatakan kualitas kredit ditetapkan menjadi :

- 1) Lancar,
- 2) Dalam Perhatian Khusus,
- 3) Kurang Lancar,
- 4) Diragukan, dan
- 5) Macet

Menurut Veithzal Rivai, dkk., (2007, hal. 451), menyatakan unsur utama dalam menentukan kualitas kredit adalah waktu

pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Perinciannya adalah sebagai berikut :

1) Kredit ancar (*Pass*), kriterianya :

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2) Perhatian khusus (*Special Mention*), kriterianya :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c) Mutasi rekening relatif aktif.
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang lancar (*Substandard*), kriterianya :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*Doubtful*), kriterianya :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga.
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*Loss*), kriterianya :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dalam menyusun tesis ini penulis mereferensikan beberapa penelitian terdahulu yaitu :

**Tabel II-1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1	Pratiwi dan Syahelmi (2009)	Peranan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pemberian Kredit Pada PT.	Peranan lingkungan pengendalian terhadap pemberian kredit sangat

		Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Cabang Putri Hijau Medan	berguna keberadaannya karena dapat meminimalisasikan tingkat penyelewengan dan penipuan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Peranan lingkungan pengendalian terhadap pemberian kredit sudah berjalan dengan baik.
2	Luh Artining Miradewi, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Gede Adi Yuniarta (2014)	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt	Hasil pengujian menunjukkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Pengujian kepatuhan dengan menggunakan attribute sampling, metode stop-or-go sampling menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan efektif.

lanjutan tabel II-1

3	Jeaneth Rut Uhise (2013)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Manado	Hasil penelitian menunjukkan PT. BRI cabang Manado telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian, seperti nilai integritas yang ditunjukkan melalui kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Selain itu, BRI memiliki sistem yang disebut dengan <i>Load Analysis System</i> sebagai sistem perkreditan yang digunakan BRI, untuk menghasilkan kualitas kredit yang diterima dan dapat dipertanggung jawabkan.
4	Imran Bahar (2010)	Studi Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Pemberian Kredit	Terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internal menunjang efektivitas prosedur pemberian kredit.
5	Dewi, Nadia Maya Sari dan Darsono (2012)	Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Macet Yang Diberikan Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang.	Pembiayaan yang mengalami pengembalian macet efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan melainkan karena faktor-faktor lain seperti hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baik pihak manajemen maupun

lanjutan tabel II-1

			nasabah yaitu faktor lingkungan dan faktor keadaan nasabah.
6	Riska S. Papalangi (2013)	Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dalam perkreditan dapat mencegah adanya penyalgunaan wewenang dan dapat menjamin keamanan atas kredit tersebut

## B. Kerangka Berpikir

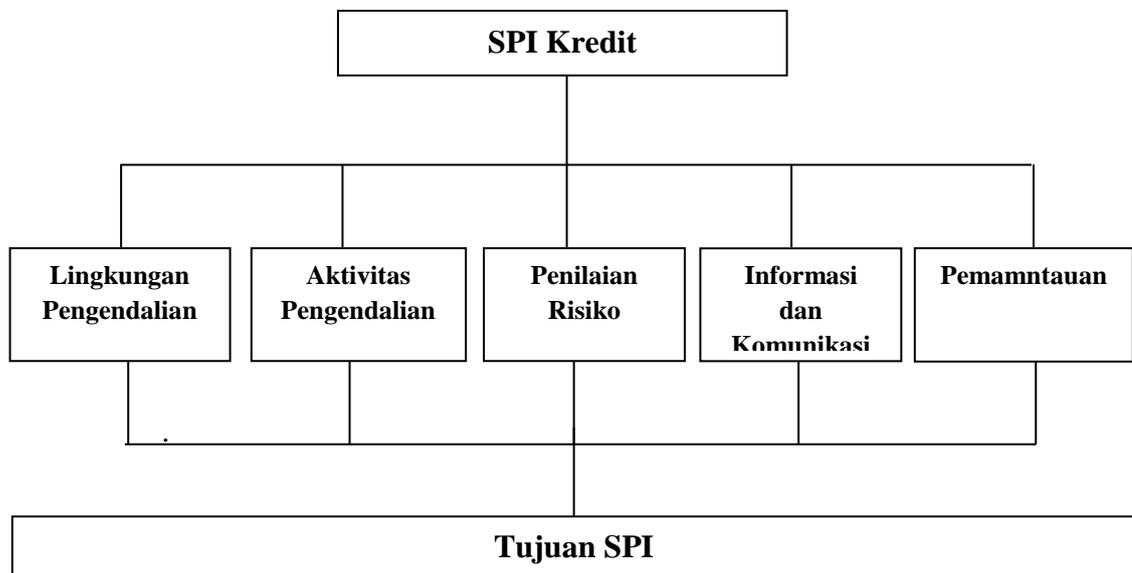
Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit. Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Prosedur pemberian kredit yang baik dan benar sangat diharapkan oleh pihak bank. Hal ini merupakan bagian dari pengendalian internal yang dibuat oleh pihak bank. Sistem pengendalian internal memiliki komponen atau unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Unsur-unsur ini disediakan untuk suatu struktur yang dapat memberikan keyakinan memadai bagi pihak manajemen dalam

mempertimbangkan banyak kemungkinan yang berhubungan dengan tujuan pengendalian internal bank..

Dengan terselenggaranya pengendalian internal kredit yang baik berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh bank tersebut. Sehingga SPI pemberian kredit yang diharapkan bisa tercapai sesuai dengan tujuan dari SPI pemberian kredit tersebut.



**Gambar II-1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Sugiyono (2010, hal. 15) menyatakan, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi., analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis



### C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan jabaran dari variabel penelitian secara ringkas. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pada pemberian kredit. Sistem pengendalian internal kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Bahwa bank harus menerapkan pengendalian internal yang dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap hal-hal yang dapat merugikan bank serta terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat.

Sistem pengendalian internal memiliki unsur-unsur atau komponen yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menekankan pada semua faktor kunci yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi integritas dan nilai etika, komitmen atas kompetensi, filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan, struktur organisasi, keterlibatan dewan pengawas, serta kebijakan sumber daya manusia dan aplikasinya.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya, baik risiko yang berasal dari eksternal perusahaan maupun risiko yang berasal dari internal perusahaan. Risiko ini

terkait dengan penetapan tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan. Olehnya itu, setiap organisasi atau perusahaan harus melakukan penafsiran risiko secara memadai.

### 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan dengan baik. Dalam pemberian kredit pihak otorisasi atau pejabat yang berwenang wajib mengacu pada prinsip pemberian kredit (prinsip 5C), yaitu :

- a) *Character* (Karakter)
- b) *Capacity* (Kemampuan)
- c) *Capital* (Modal)
- d) *Collateral* (Agunan)
- e) *Condition* (Kondisi)

### 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi diperlukan pada tiap level di dalam organisasi. Informasi dan komunikasi akan mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan organisasi.

### 5. Pemantauan (*Monitoring*)

Bahwa pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini

mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat penelitian dilakukan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa *report sales and quality* dan buku panduan pemberian kredit dari BTPN MUR Cabang Pemantangsiantar.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Ulber Silalahi (2009, hal.280), menyatakan pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Adalah suatu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Melalui wawancara ini responden diberi pertanyaan yang sama dalam bentuk essay.

## 2. Teknik Dokumentasi

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan *report sales and quality* dan melalui buku pedoman pemberian kredit perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan

yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Tujuan dari analisis data dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik yang dianalisis.

Kegiatan dalam analisis data penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data pencairan kredit dan kredit bermasalah yang diperoleh melalui wawancara kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan pemberian kredit.
2. Reduksi Data, Yaitu merangkum hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal yang penting, Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Analisis Data, analisis data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh mengailalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan

menganalisis penerapan sistem pengendalian kredit di BTPN MUR Cabang Pematangsiantar.

4. Dari hasil analisis akan ditarik kesimpulan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini. Konsep-konsep dasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemberian kredit di BTPN MUR Cabang Pematangsiantar.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) Cabang Pematangsiantar

BTPN MUR Cabang Pematangsiantar resmi beroperasi sejak tanggal 14 November 2008, berlokasi di Jalan Merdeka No. 127, Pematangsiantar. BTPN MUR Cabang Pematangsiantar termasuk dalam Regional Sumatera Utara. BTPN MUR Cabang Pematangsiantar memiliki karyawan 14 orang, yang dipimpin oleh Kepala Cabang (*Branch Manager*) dan memiliki 3 departemen, yaitu departemen *Operation* yang terbagi atas *Relationship Anchor Frontline*, *Branch Service Manager (BSM)*, *Teller and Customer Service*, dan *Relationship Anchor (RA)*. Departemen *Marketing*, terdiri atas *Relationship Officer (RO)*, dan departemen *Credit* terdiri atas *Credit Administration (CA)*, *Credit Officer (CO)*, dan *Field Collection (FC)*

Departemen *Operation* bertugas untuk mengelola keuangan persahaan mulai dari penerimaan pembayaran dari nasabah, melakukan proses awal dalam hal terjadi kredit bermasalah nasabah, hingga melakukan pembukuan atas piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih lagi. Departemen *Marketing* bertugas untuk kegiatan menawarkan atau mencari nasabah untuk kredit (*lending*). Departemen *Credit* bertugas melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan laporan dari departemen *Marketing*,

selanjutnya dilakukan kunjungan-kunjungan terhadap nasabah yang mengajukan kredit guna mengetahui apakah nasabah sudah memenuhi kriteria dalam pengajuan kredit.

## **2. Prosedur Pemberian Kredit Pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar**

Prosedur pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar meliputi :

### **a. Tahap Permohonan**

Dalam prosedur ini, pemohon kredit atau calon debitur harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan agar permohonan kreditnya dapat diproses. Persyaratan yang dimaksud adalah:

- 1) Identitas calon debitur meliputi :
  - a) Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Suami/Istri
  - b) Fotocopy Kartu Keluarga.
  - c) Fotocopy Akta Nikah.
  - d) Pas foto debitur dan suami/istri.
  - e) Fotocopy surat Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk WNI keturunan.
  - f) Fotocopy Kartu NPWP untuk permohonan di atas Rp. 50 Juta.
- 2) Bukti kepemilikan agunan dan kelengkapan lainnya yaitu:

- a) Fotocopy bukti kepemilikan atas agunan yang diberikan (SHM, SK. Camat, dan atau BPKB)
- b) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- c) Fotocopy surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Ketika segala persyaratan tersebut telah dimiliki, calon debitur kemudian diminta untuk mengisi MUR *Customer Assesment* (MCA). MUR *Customer Assesment* (MCA) merupakan salah satu tools dalam melakukan penilaian (*assesment*) untuk debitur.

Proses seleksi awal/ pengajuan pinjaman dilakukan oleh *Relationship Officer (RO)* meliputi :

- 1) RO wajib menjelaskan kepada debitur seluruh informasi mengenai manfaat produk, layanan dan risiko produk serta menjelaskan mengenai kewajiban seorang debitur yang wajib diketahui oleh calon debitur.
- 2) RO wajib menjelaskan tata cara pengisian MCA dan memastikan MCA di isi langsung oleh calon debitur.
- 3) Disaat proses MCA, RO tidak diperkenankan memberikan janji kepastian mengenai kondisi fasilitas kredit yang akan diberikan, melakukan input data yang tidak benar (bukan berdasarkan informasi calon debitur), dan membiarkan atau membantu debitur melakukan kecurangan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam MCA.

Fungsi MCA adalah *scoring* untuk menentukan risk level dari calon debitur yang akan menghasilkan 4 level risiko sebagai berikut :

- 1) *Very High Risk Customer*
- 2) *High Risk Customer*
- 3) *Medium Risk Customer*
- 4) *Low Risk Customer*

Adapun tujuan dari hasil MCA ini adalah untuk mengetahui *plafond*, *Loan to Value (LTV)*, dan suku bunga yang dapat diperoleh oleh calon debitur, dengan skema sebagai berikut :

**Tabel IV-1**  
**Skema Ketentuan Produk**  
**BTPN Mitra Usaha Rakyat**

<b>Risk Level</b>	<b>Plafond</b>	<b>LTV</b>	<b>Suku Bunga</b>
<b>High Risk</b>	Rendah	Rendah	Tinggi
<b>Medium Risk</b>	Sedang	Sedang	Sedang
<b>Low Risk</b>	Tinggi	Tinggi	Rendah

#### **b. Penyelidikan dan Analisis Kredit**

Prosedur ini dilakukan oleh petugas *Credit Administration (CA)* yang meliputi:

- 1) *Internal Checking*

Internal Checking dilakukan oleh CA melalui Usaha Mikro Kecil (UMK) checking, pengecekan *Customer Information File (CIF)* dan *BTPN Checking*. Bukti pengecekan wajib di

catat pada Lembar Verifikasi Credit Admin (LVCA) sebagai bukti telah dilakukan Internal Checking.

## 2) Eksternal *Checking*

Proses eksternal *checking* wajib dilakukan oleh CA, dan bukti pengecekan wajib dilampirkan pada Memo Keputusan Kredit (MKK), atau di catatan pada LVCA sebagai bukti telah dilakukan. Eksternal *checking* meliputi :

### a) Daftar Hitam Nasional (DHN)

Cabang wajib melakukan pengecekan apakah debitur masuk DHN yang dikeluarkan oleh BI, jika:

- (1) Total pinjaman di BTPN (termasuk yang diajukan) > Rp. 500.000.000,- atau
- (2) Calon debitur memiliki rekening koran/ giro di BTPN maupun di tempat lain
- (3) Pengecekan DHN wajib dilakukan sebelum proses persetujuan kredit dan apabila calon debitur masuk dalam DHN maka permohonan kredit wajib ditolak.

### b) BI Checking/ Sistem Informasi Debitur (SID) *Checking*

Cabang wajib memastikan apakah calon debitur, suami/ istri dan badan usahanya (bila ada) mempunyai pinjaman di tempat lain dan memeriksa kondisi pinjaman tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam analisa kredit. Calon debitur atau sumai/ istri dan badan usahanya (bila ada), dengan

kolektibilitas 3, 4, 5, di bank lain dalam 3 bulan terakhir maka persetujuan kredit wajib di tolak, dan tidak dapat dideviasikan.

**Tabel IV-2**  
**Skema Ketentuan Kolektibilitas**  
**BTPN Mitra Usaha Rakyat**

<b>Risk Level</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Persetujuan Deviasi</b>
<b>Low</b>	Kol. 1 > 15 hari s/d Kol. 2 = 30 hari	OLA Bagian kredit maksimum Regional Credit Manager (RCM)
<b>Medium</b>	Kol. 1 > 15 hari tanpa bukti angsuran, atau Kol. 2 ≤ 7 hari	OLA Bagian kredit
	Kol. 2 > 7 hari	Kantor Pusat
<b>High</b>	Tidak diperkenankan deviasi	

### 3) Verifikasi

Petugas verifikasi bertanggung jawab terhadap semua informasi hasil verifikasi yang tercantum pada semua dokumen kredit. Permohonan kredit wajib ditolak apabila berdasarkan verifikasi diketahui bahwa :

- a) Usaha calon debitur tidak ada, atau
- b) Debitur tidak diketahui keberadaannya, atau
- c) debitur memberikan informasi yang tidak sesuai (informasi palsu)

Verifikasi dilakukan oleh petugas *Credit Officer (CO)* yang meliputi :

- a) Verifikasi Usaha

Verifikasi usaha meliputi:

- (1) Verifikasi usaha dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan memastikan kemampuan bayar calon debitur dalam menjalankan usahanya dan memastikan kemampuan bayar dari calon dbeitur terhadap pinjaman yang akan diberikan.
- (2) Dilakukan dengan mengunjungi lokasi usaha dan bertemu langsung dengan debitur.
- (3) Petugas verifikasi wajib melampirkan foto lokasi usaha yang memuat tanggal foto, dengan ketentuan gambar/ foto yang wajib diambil minimal 4 (empat) foto seperti : tampak depan/ muka loaksi usaha, lingkungan sekitar tempat usaha, kondisi bagian dalam tempat usaha, dan kondisi persediaan barang dagangan/ proses produksi (sesuai dengan jenis usahanya).

b) Verifikasi Agunan

Verifikasi agunan bertujuan untuk :

- (1) Memastikan keberadaan agunan dengan melihat fisik agunan
- (2) Memastikan agunan bukan merupakan aset yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan, misalnya

bangunan pabrik/ tempat industri perumahan yang membuang limbah yang mencemari lingkungan, baik darat, udara, maupun air (sungai).

- (3) Membandingkan jenis/ bentuk agunan dengan data di dokumen agunan.
- (4) Mendapatkan nilai pasar agunan dan nilai marketability yang aman bagi bank.
- (5) Melakukan verifikasi kepemilikan agunan.
- (6) Hasil verifikasi wajib dituangkan dalam Lembar Verifikasi Debitur dan Penilaian Agunan (LVDPA) yang berlaku.

c) Verifikasi Tabungan

Verifikasi ini meliputi :

- (1) Dalam verifikasi ini *Credit Administration (CA)* wajib melakukan konfirmasi kepada cabang dimana tabungan ditempatkan untuk memastikan bahwa dana tabungan masi tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan nilai agunan yang harus diserahkan, serta diblokir sebelum pencairan.
- (2) Hasil konfirmasi di catat pada Lembar Verifikasi Credit Administration (LVCA) dilengkapi dengan nama dan nomor telepon petugas yang dihubungi.

(3) CO wajib memastikan hasil verifikasi CA sudah dilakukan dengan benar dan dokumen lengkap.

(4) CO wajib memastikan bahwa proses blokir sebelum pencairan dapat dijalankan oleh cabang penempatan tabungan.

**c. Rekomendasi Kredit**

*Area Credit Manager (ACM)* melakukan analisa kemampuan bayar debitur dan memberikan rekomendasi kredit berdasarkan hasil survey CO yang dituangkan pada Memo Keputusan Kredit (MKK) ACM sebagai berikut :

- 1) Kemampuan bayar debitur perorangan/ badan usaha dilakukan dengan menggunakan perhitungan *Instalment to Disposable Income Ratio (IDIR)*.
- 2) ACM tidak diperkenankan memberikan rekomendasi kredit apabila hasil usaha tidak dapat memenuhi kewajiban bayar calon debitur atau kebutuhan modal kerja tidak sesuai dengan *Work Investment (WI)*.
- 3) CA wajib mengimput dan mencetak MKK sesuai rekomendasi pada MKK ACM.
- 4) Apabila ACM tidak setuju dengan data hasil survey CO, ACM dapat melakukan verifikasi / meminta tambahan data yang diperlukan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam

pemberian kredit sebelum memutuskan apakah proposal dapat disetujui atau ditolak.

- 5) MKK ACM dan MKK yang ditandatangani oleh pemegang limit Batas Wewenang Memutuskan Kredit (BWMK) merupakan satu kesatuan sebagai bukti keputusan kredit yang berlaku.

#### **d. Persetujuan Kredit**

Persetujuan kredit dilakukan oleh *Branch Manager (BM)*

dan komite kredit di Area, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Minimal oleh 2 (dua) anggota komite kredit, salah satunya wajib komite kredit bagian kredit (MCO/ ACM/ RCR/ RCM/ RCMK/ Komite Kredit Kantor Pusat)
- 2) Komite kredit yang dapat memberikan persetujuan kredit adalah yang memiliki limit BWMK yang tidak sedang dicabut/ dibekukan.
- 3) Seluruh anggota komite kredit dapat di berikan wewenang memutuskan kredit sesuai yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan BWMK serta wewenang BWMK yang tercantum pada list dinamik BWMK.
- 4) Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai kondisi fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur (plafon, jangka waktu, agunan, suku bunga, produk, dan lain sebagainya)

maka dapat dilakukan proses persetujuan banding dengan mekanisme *OLA (One up Level Approval)*.

- 5) Jika diperlukan, debitur yang disetujui dengan proses banding kepada komite kredit yang lebih tinggi akan dibatasi dalam jumlah tertentu yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri dengan persetujuan dari *Bussiness Risk & Control Head UMK*.

Apabila semua prosedur disetujui maka ditindak lanjuti.

Adapun prosedur lanjutan yang dilakukan adalah:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh CA. Petugas memeriksa keabsahan dokumen jaminan yang biasanya ditentukan berdasarkan penjadwalan wawancara antara pihak debitur dengan pihak petugas (CA) mengenai kredit perjanjian/surat keputusan dan penandatanganan warkat-warkat yang berisi ; jumlah pinjaman kredit, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu kredit yang diajukan, pola angsuran, besarnya kewajiban per bulan (pokok dan bunga), dan barang-barang agunan.
- 2) BM wajib memeriksa dokumen persetujuan kredit sebelum melakukan pengikatan dan memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat pinjaman kepada debitur sesuai dengan standar informasi produk yang ditentukan oleh kantor pusat.

**e. Pengikatan Kredit**

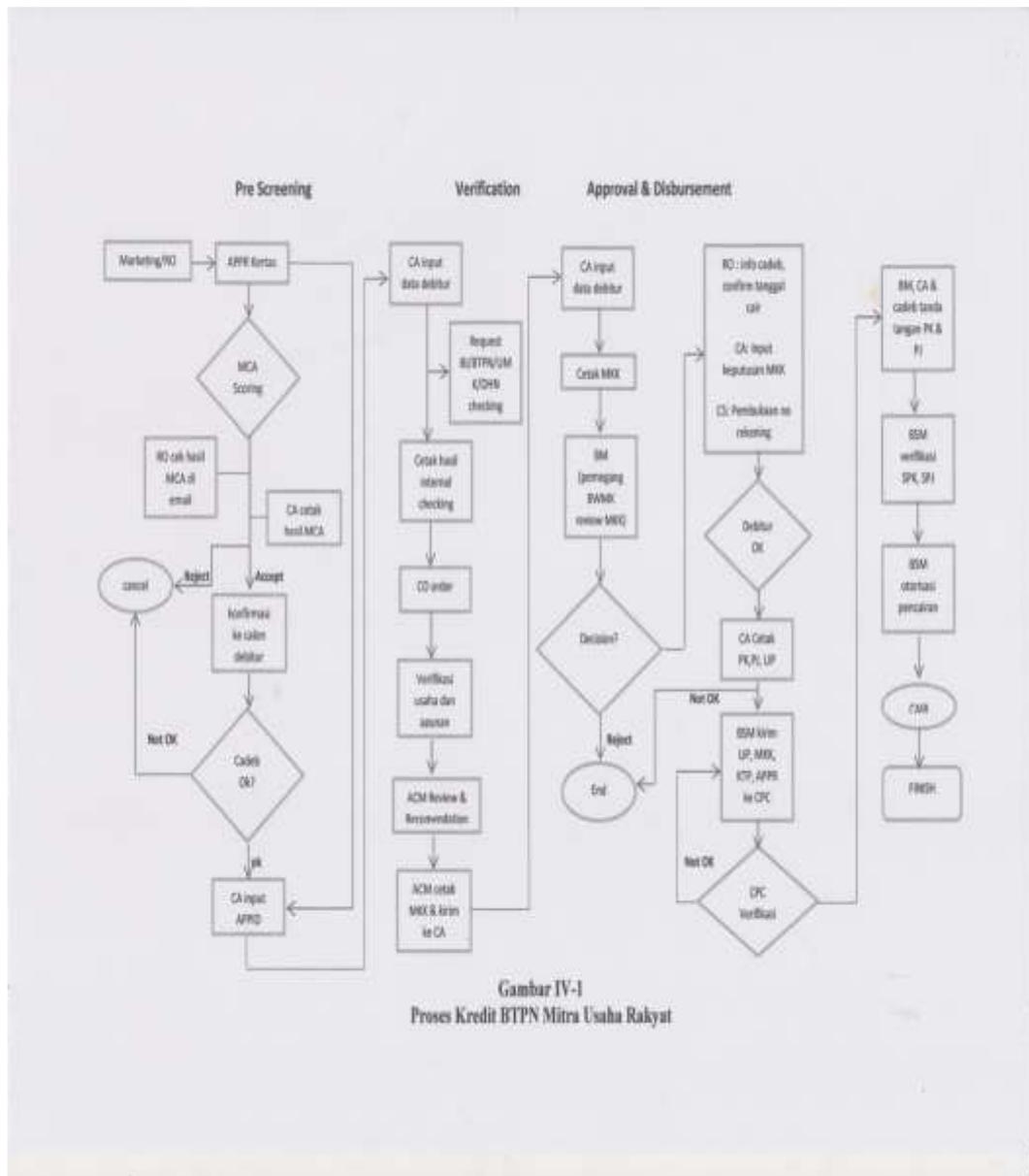
Ketentuan pengikatan kredit dan agunan meliputi :

- 1) Wajib menggunakan standar format Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang berlaku di UMK.
- 2) SPK wajib ditandatangani oleh debitur dan pihak bank.
- 3) Pihak bank diwakili oleh pemegang surat kuasa untuk melakukan pengikatan dan perjanjian kredit dengan debitur sesuai yang diatur pada SOP.
- 4) Debitur dan pasangannya adalah sesuai dengan data debitur yang mengajukan pinjaman.

**f. Pencairan Kredit**

Jika kredit telah disetujui bank, maka dana akan dicairkan ke rekening tabungan atas nama calon debitur (untuk perorangan) dan rekening atas nama badan usaha atau atas nama perorangan sebagai wakil perusahaan yang ditunjuk (untuk badan usaha).

BSM wajib memastikan seluruh dokumen persetujuan kredit (MKK), dokumen perjanjian kredit (SPK), dan dokumen lain yang dipersyaratkan pada MKK untuk dipenuhi sebelum pencairan harus sudah lengkap. Apabila terdapat dokumen (baik dokumen persetujuan maupun dokumen persyaratan) yang belum lengkap, pinjaman yang sudah dicairkan pada rekening *hold account* tidak diperkenankan untuk dilanjutkan sampai seluruh dokumen lengkap.



**Gambar IV-1**

**Proses Kredit BTPN Mitra Usaha Rakyat**

## **B. Pembahasan**

BTPN MUR Cabang Pematangsiantar membentuk prosedur dalam pemberian kredit melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah BTPN MUR dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh BTPN MUR Cabang Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

### **1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**

Lingkungan pengendalian menekankan pada semua faktor kunci yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian meliputi integritas dan nilai etika, komitmen atas kompetensi, filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan, struktur organisasi, keterlibatan dewan pengawas, serta kebijakan sumber daya manusia dan aplikasinya.

Secara umum, lingkungan pengendalian BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dalam kaitannya dengan pemberian kredit digambarkan sebagai berikut :

#### **a. Integritas dan nilai etika**

BTPN MUR Cabang Pematangsiantar sangat menjunjung tinggi integritas. BTPN MUR Cabang Pematangsiantar memiliki kebijakan dan prosedur pemberian kredit dan hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten. Hal itu terlihat dari tahap awal permohonan sampai dengan pencairan kredit setiap bagian

melakukan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Selain itu, BTPN MUR Cabang Pematangsiantar juga memiliki kode etik yang mengatur tentang perilaku. Dimana pada tahapan awal permohonan kredit RO tidak dibenarkan atau diperbolehkan membantu calon debitur dalam mengisi atau menjawab pertanyaan yang ada dalam MCA.

Kode etik tersebut komprehensif dan mencakup hal-hal seperti pertentangan kepentingan, hal-hal illegal atau tidak benar. Dengan demikian, pihak manajemen akan melakukan tindakan secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai atau karyawan yang berbuat tidak jujur.

b. Komitmen atas kompetensi

Kompetensi menjadi pertimbangan manajemen untuk melaksanakan tugas- tugas tertentu pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar. Kompetensi merupakan suatu pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan.

Dalam hal ini BTPN MUR Cabang Pematangsiantar sangat jelas dalam uraian tugas (job description) yang menguraikan tugas tertentu menjadi salah bukti komitmen manajemen kompetensi para pegawai atas karyawannya, seperti BTPN MUR Cabang Pematangsiantar memiliki *flowchart* prosedur pemberian kredit yang dipahami oleh setiap karyawan yang berada di sana.

c. Filosofi dan gaya manajemen

Filosofi dan gaya manajemen akan berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian terutama bila manajemen didominasi oleh satu atau beberapa orang individu. Dalam tahapan penyelidikan dan analisis kredit BTPN MUR Cabang Pematangsiantar tidak menugaskan satu orang atau satu bagian asaja, namun dalam tahapan ini dilaksanakan oleh CA dan CO dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya, dalam tahapan persetujuan kredit BTPN MUR Cabang Pematangsiantar juga menugaskan minimal 2 (dua) komite dalam melakukan atau memberikan persetujuan kredit. Dimana ada pilihan komite kredit apabila komite kredit yang lain berhalangan atau wewenangnya dalam memutuskan kredit dicabut (MCO/ACM/RCR/RCM/RCMK/Komite Kantor Pusat).

Pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar, manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan kreatif, termasuk dalam pemberian kredit kepada nasabah atau debitur.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi formal berkaitan dengan lingkungan pengendalian. BTPN MUR Cabang Pematangsiantar memiliki struktur

organisasi yang jelas yang menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi semua karyawan.

Dalam setiap tahapan proses pemberian kredit mulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan pencairan kredit pembagian tugas masing-masing bagian sangat jelas dan tidak ada yang melakukan rangkap tugas.

e. Keterlibatan Dewan pengawas

Dewan Pengawas mempunyai suatu deskripsi tugas dan tanggung jawab secara tertulis sehingga dapat diketahui seberapa jauh keterlibatan Dewan Pengawas di dalam perusahaan ini. Dewan pengawas dalam tahapan proses pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar terlihat pada saat tahapan persetujuan yang dilaksanakan oleh *Review Credit Risk (RCR)*.

f. Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari sekian banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang sangat penting. Memiliki SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

BTPN MUR Cabang Pematangsiantar memiliki kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam rangka mendapatkan SDM yang jujur dan kompeten terhadap tugasnya. Selain itu, adanya deskripsi tugas karyawan dan kebijakan terkait dalam

hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab menjadi bukti usaha BTPN MUR Cabang Pematangsiantar untuk mencapai tujuannya.

## **2. Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)**

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya, baik risiko yang berasal dari eksternal perusahaan maupun risiko yang berasal dari internal perusahaan. Risiko ini terkait dengan penetapan tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan.

Sistem tahapan permohonan kredit melalui aplikasi MCA dibuat untuk mengetahui berapa pinjaman yang dapat diterima oleh calon debitur. Melalui pertanyaan yang diajukan dalam sistem ini akan memberikan hasil bahwa calon debitur masuk ke dalam kategori *high risk*, *medium risk* atau *low risk*. Hal ini menunjukkan adanya penilaian resiko yang dilakukan BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dalam menghindari kesalahan dalam pemberian besar pinjaman yang akan di setujui.

BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dalam penilaian resiko juga dilakukan dalam penyelidikan dan analisa kredit. Hal itu dilakukan dalam penentuan kolektibilitas, dimana BTPN MUR

Cabang Pematangsiantar menetapkan standarisasi dalam *risk level* untuk kolektibilitas yang dapat diterima oleh BTPN MUR Cabang Pematangsiantar. Dalam skema ketentuan kolektibilitas diatur dalam 3 (tiga) risk level yaitu low, medium, dan high. Dari ketentuan ini calon debitur dapat diketahui masuk dalam kategori yang mana.

Penafsiran risiko juga diterapkan dalam rekomendasi kredit BTPN MUR Cabang Pematangsiantar, hal ini dalam menganalisa kemampuan bayar calon debitur atau dalam prinsip 5C termasuk dalam kemampuan (*capacity*) dan ACM tidak akan memberikan rekomendasi apabila hasil analisa menunjukkan calon debitur tidak dapat memenuhi kriteria dalam memenuhi kewajibannya.

### **3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)**

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan dengan baik. Di dalam prosedur pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar, hal ini dilakukan dalam tahapan permohonan pada saat calon debitur melakukan pengisian di MUR *Customer Assesment* (MCA) RO tidak diperkenankan memberikan janji kepastian mengenai kondisi fasilitas kredit yang akan diberikan, melakukan input data yang tidak benar (bukan berdasarkan informasi calon debitur), dan membiarkan atau membantu debitur melakukan kecurangan dalam menjawab

pertanyaan yang diajukan dalam MCA. Namun RO dalam pengisian MCA sering membantu dan memberikan arahan agar calon debitur mendapatkan hasil penilaian yang baik dari MCA. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target pencapaian kredit yang diberikan oleh BTPN MUR Cabang Pematangsiantar kepada RO.

Pada Tahap penyelidikan dan analisa kredit aktivitas pengendalian dan SPI juga dijalankan oleh BTPN MUR Cabang Pematangsiantar melalui verifikasi usaha dan tabungan. Dalam verifikasi ini BTPN MUR Cabang Pematangsiantar melalui petugas CO akan menganalisa apakah usaha yang dijalankan mendapatkan omset/ hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan yang buat oleh calon debitur. Hal ini terkait dengan prinsip 5C yaitu *capacity* (kemampuan) bayar dari calon debitur dan *collateral* (agunan) dalam verifikasi agunan. Namun tidak jarang CO mendapatkan perbedaan laporan keuangan yang dibuat oleh calon debitur berbeda dengan hasil wawancara dilapangan.

BTPN MUR Cabang Pematangsiantar juga menerapkan aktivitas pengendalian pada tahapan rekomendasi kredit, dimana dari hasil survey CO, ACM akan menganalisa kemampuan bayar calon debitur atau dalam prinsip 5C termasuk dalam kemampuan (*capacity*) dan ACM tidak akan memberikan rekomendasi apabila hasil analisa menunjukkan calon debitur tidak dapat memenuhi kriteria dalam memenuhi kewajibannya.

Pengendalian internal untuk aktivitas pengendalian juga dilakukan dalam tahapan pengikatan kredit, hal itu terlihat adanya ketentuan pengikatan kredit dan agunan yang meliputi:

- 1) Wajib menggunakan standar format Surat Perjanjian Kredit (SPK) yang berlaku di UMK.
- 2) SPK wajib ditandatangani oleh debitur dan pihak bank.
- 3) Pihak bank diwakili oleh pemegang surat kuasa untuk melakukan pengikatan dan perjanjian kredit dengan debitur sesuai yang diatur pada SOP.
- 4) Debitur dan pasangannya adalah sesuai dengan data debitur yang mengajukan pinjaman.

Dalam tahapan pencairan kredit BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dalam melaksanakan aktivitas pengendalian nya, BTPN MUR Cabang Pematangsiantar melalui *Branch Service Manager* (BSM) wajib memastikan seluruh dokumen persetujuan kredit (MKK), dokumen perjanjian kredit (SPK) dan dokumen lain yang dipersyaratkan pada MKK untuk dipenuhi sebelum pencairan harus sudah lengkap.

#### **4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)**

Informasi dan komunikasi diperlukan pada tiap level di dalam organisasi. Informasi dan komunikasi akan mempengaruhi

kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan organisasi.

Pengendalian internal untuk informasi dan komunikasi pada tahapan permohonan terlihat dari adanya prosedur yang dilakukan oleh BTPN MUR Cabang Pematangsiantar saat pengisian MCA, dimana dalam pengisian itu BTPN MUR Cabang Pematangsiantar menggali informasi terkait data pribadi dan usaha calon debitur melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui aplikasi tersebut.

Pada tahapan penyelidikan dan analisa juga dilakukan pengendalian internal untuk informasi dan komunikasi melalui internal checking dan eksternal cheking terkait calon debitur. Hasil yang di dapat yaitu informasi terkait *history* peminjaman calon debitur yang sedang berjalan atau yang sudah lunas di BTPN (internal checking) dan informasi dari eksternal yaitu kondisi kolektibilitas calon debitur di bank atau perusahaan pembiayaan di luar BTPN. Informasi ini di dapat melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dari BI Cheking.

Apabila semua prosedur disetujui maka akan ditindak lanjuti. Tahapan selanjutnya CA dan BM akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen melalui wawancara dengan debitur. CA akan menjelaskan perjanjian/ surat keputusan terkait fasilitas kredit yang disetujui. Dalam tahap ini CA dan BM memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat pinjaman

kepada debitur. Hal ini menunjukkan adanya informasi dan komunikasi serta pemantauan terkait permohonan yang disetujui. Namun sering sekali disaat CA dan BM melakukan wawancara sebelum pengikatan kredit, tujuan penggunaan kredit yang tertuang dalam MKK berbeda dengan yang di jawab oleh debitur. Maka di BTPN MUR Cabang Pematangsiantar sering hasil persetujuan di batalkan, karena sudah tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang dia atur.

#### **5. Pemantauan (*Monitoring*)**

Pemantauan merupakan proses penilaian struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan struktur pengendalian internal, khususnya dalam hal pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dilaksanakan oleh pihak manajemen yaitu bagian analis kredit pada tahapan penyelidikan dan analisa. Pemantauan dalam penyelidikan dan analisa kredit dilakukan melalui bukti hasil dari checking dan verifikasi. Dari bukti tersebut dipastikan tidak berbeda dengan apa yang dituangkan dalam Memo Keputusan Kredit (MKK). Apabila ada perbedaan atau penyimpangan, maka BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dapat mengetahui siapa yang melakukan kecurangan tersebut melalui LVCA dan LVDP.

Pemantauan rekomendasi kredit juga dilakukan melalui input dan hasil cetak MKK yang dilakukan oleh CA. Dari hal ini, pihak manajemen bisa memantau hasil rekomendasi yang di input ke aplikasi sudah sesuai dengan yang diatur dalam SOP. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam proses pemberian kredit.

Dari pembahasan diatas, BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dalam menyalurkan kredit, secara teori telah menjalankan SPI dalam pemberian kredit nya. Namun ada didalam beberapa tahapan SPI tersebut tidak dilakukan sepenuhnya. Kecurangan dalam mengabaikan SPI dilakukan pada umumnya adalah petugas RO. RO dalam tahapan prosedur pemberian kredit sering mengabaikan aktivitas pengendalian dalam menganalisa kemampuan bayar (*capacity*) dan tujuan permohonan kredit (*purpose*), dimana ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip 5C dalam pemberian kredit

Malayu S.P. Hasibuan, (2002, hal.105), menyatakan tujuan pengendalian internal kredit antara lain adalah untuk:

- 1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- 2) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- 3) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.

4) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank

Melalui hal ini, kecurangan yang dilakukan oleh RO pada dasarnya demi mencapai target kredit yang diberikan oleh BTPN MUR Cabang Pematangsiantar. Alasan nya, sangat susah memperoleh debitur apabila menjalankan sepenuhnya SPI tersebut. Hal ini menunjukkan BTPN MUR Cabang Pematangsiantar melauai BM menunjukkan adanya kelemahan dalam memantau (*monitoring*) setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karywan. Akibatnya dapat merugikan perusahaan melalui timbulnya debitur yang gagal bayar. Sehingga dengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan SPI dalam pemberian kredit menunjukkan adanya kegagalan BTPN MUR Cabang Pematangsiantar untuk mencapai tujuan SPI tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian internal pemberian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar pada umumnya sudah sesuai dengan teori yang ada , namun dalam penerapannya ada beberapa komponen pengendalian internal kredit tidak dijalankan sepenuhnya. Komponen sistem pengendalian internal pemberian kredit yang tidak dijalankan sepenuhnya yaitu aktivitas pengendalian (*control activities*). *Relationship Officer* (RO) sering sekali mengabaikan prinsip 5C dan konsep 7P dalam pemberian kredit yaitu kemampuan (*capacity*) dan tujuan permohonan kredit (*purpose*). dan pemantauan (*monitoring*). Hal ini dilakukan demi mencapai target kredit yang diberikan oleh perusahaan. Dimana perusahaan seakan memaksakan RO dalam menjalankan kredit.
2. Dalam tahapan awal pemberian kredit BTPN MUR Cabang Pematangsiantar pemantauan (*monitoring*) terhadap tugas RO sangat lemah. Sehingga RO dapat melakukan kecurangan dengan membatu calon debitur dalam mengisi setiap pertanyaan yang ada pada MUR *Customer Assesment* (MCA).

3. Dengan adanya penyimpangan dengan tidak melakukan sepenuhnya komponen sistem pengendalian internal kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar, maka tujuan sistem pengendalian kredit pada BTPN MUR Cabang Pematangsiantar tidak tercapai sesuai dengan harapan perusahaan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, penulis mencoba memberikan saran sebagai masukan yaitu :

1. BTPN MUR Cabang Pematangsiantar dalam mencapai target kredit agar memperhatikan kondisi baik pasar maupun kemampuan bank dalam bersaing. Sehingga RO tidak terlalu memaksakan sebuah pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kriteria bank. Sehingga pengendalian internal pemberian kredit dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam tahapan permohonanan BTPN MUR Cabang Pematangsiantar agar menempatkan petugas bagian kredit disaat calon debitur melakukan pengisian MUR *Customer Assesment* (MCA) dan tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada RO. Hal ini agar terhindar kecurangan-kecurangan dalam pengisian MCA tersebut.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain selain pemberian kredit agar pihak perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kinerja perusahaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno. 2008. *Auditing Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Jilid satu*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Azhar Susanto dan La Midjan. 1994. *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kedelapan*. Lembaga Informatika Akuntansi. Bandung.
- Boynton, William C. Raymond N. Johnson. Walter G.Kell. 2003. *Modern Auditing. Edisi Tujuh*. Ahli Bahasa Paul A, Gina, Gania, IchsanSetito Budi. Erlangga. Jakarta.
- Dahlan Siamat. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.
- Dewi, Nadia Maya Sari dan Darsono. 2012. *Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pencegahan Pengembalian Kredit Macet Oleh Bank BNI Syariah Cabang Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Cetakan Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hessel, Nogi. S. 2003. *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan*. Balairung & Co. Yogyakarta.
- Imran Bahar. 2010. *Studi Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Pemberian Kredit*. Jurnal Ilmiah. Universitas Diponegoro.Semarang.
- Jeaneth Rut Uhise. 2013. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Manado. *Ejournal vol 1, 3*.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum*. Jakarta. Indonesia.
- Luh Artining Miradewi, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Gede Adi Yuniarta .2014. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt*. Universitas Ganesha. Bali *Ejournal vol 2, 1*.
- Muchdarsyah Sinungan, 1993. *Manajemen Dana Bank*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyadi. 2002. *Auditing, Edisi 6*. Salemba Empat. Jakarta.

- Papalangi, Riska S. 2013. *Penerapan SPI dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT. BRI (Persero) Tbk Manado. Jurnal EMBA vol 1, 3.*
- Pratiwi dan Syahelmi.2009.Jurnal Ilmiah.*Peranan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Putri Hijau Medan.*Universitas Sumatera Utara.
- Veithzal, Rivai, dkk. 2007. *Bank and Finance Institution Management: Conventional and Sharia System.* Raja Graffindo Persada. Jakarta.
- Sawyer, dkk. 2005. *Audit Internal Sawyer.* Edisi Kelima. Terjemahan Desi Adhariani, Salemba Empat, Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial.* PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Alfabeta. Bandung.
- Suhardjono. 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah,* UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian.* Pustaka Sinar Harapan Baru. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2017.
- Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian.* Pustaka Baru. Yogyakarta.
- .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Musa Fenando Silaen

Tempat dan Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 15 April 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Toba II No. 102-B, Pematangsiantar 21125  
Sumatera Utara

Anak ke- : 2 (kedua)

### Orangtua

Ayah : (Alm) Manaor Silaen

Ibu : Anse Pardede

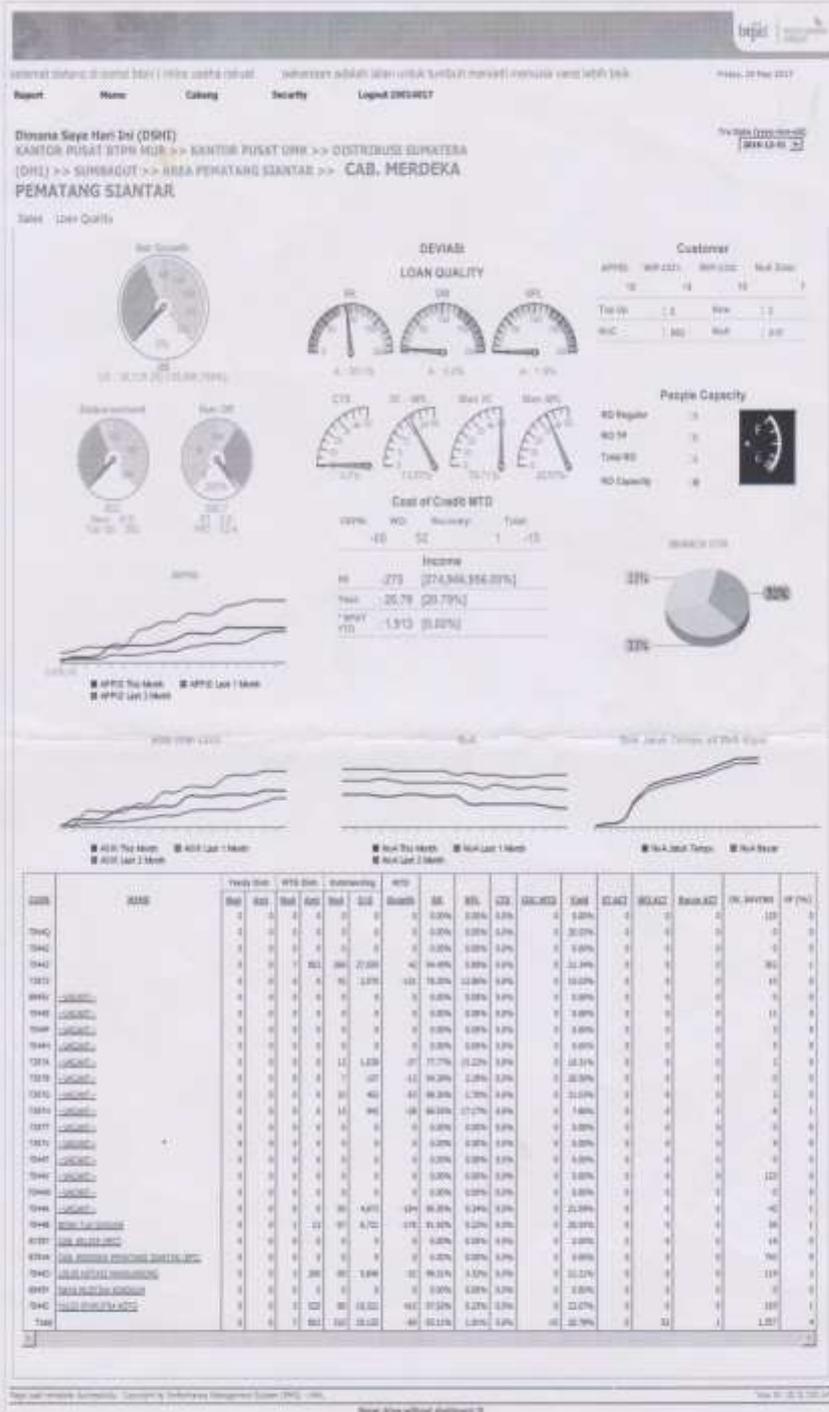
### Pendidikan Formal

1. SD Swasta YP.HKBP, Pematangsiantar 1992 - 1998
2. SLTP Negeri 3, Pematangsiantar 1998 - 2001
3. SMK Swasta YP.Maria Goretti, Pematangsiantar 2001 - 2004
4. STIE Sultan Agung, Pematangsiantar 2004 - 2007
5. STIE Sultan Agung, Pematangsiantar 2009 – 2011
6. Tahun 2015-2017 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

# LAMPIRAN









Unggul, Cerdas & Terpercaya

Sila menjajah dunia ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: ppe@umsu.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 April 2018 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : MUSA FERNANDO SILAEN  
NPM : 1520050037  
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi /Akuntansi Manajemen  
Judul Tesis : SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA BTPN MITRA USAHA RAKYAT CABANG PEMATANGSIANTAR

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : \_\_\_\_\_  
Pembimbing II : \_\_\_\_\_  
Penguji I : \_\_\_\_\_  
Penguji II : \_\_\_\_\_  
Penguji III : \_\_\_\_\_

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan, 5 April 2018

1. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPAI.  
Pembimbing I

2. Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si  
Pembimbing II

3. Dr. IRFAN, S.E., M.M  
Penguji I

4. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.  
Penguji II

5. Hj. HAFSAH, S.E., M.Si  
Penguji III



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PASCA SARJANA  
JL. DENAI NO. 217 MEDAN 20226 TELP. 061-7334942

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Nama Lengkap : MUSA FERNANDO SILAEN  
N.P.M : 1520050037  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Proposal : SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN  
KREDIT PADA BTPN MITRA USAHA RAKYAT  
CABANG PEMATANGSIANTAR

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Tesis	It Tangan
24-2-2018	a. Lampirkan sumber data penelitian. b. Perjelas uraian latar penelitian.	
16-3-2018	a. Hasil penelitian dan pembahasan di sertakan. b. Pembahasan di paragraf dengan teor & hasil penelitian terdahulu yang relevan.	
19-3-2018	a. Tesis lengkap kesimpulannya & b. Sertakan pada abstrak	
22-3-2018	Selesai bimbingan tesis	

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QiA., Ak., CA.,CPAL

Dr. Muhyarsyah, SE., M.Si.

Diketahui Oleh,  
Ketua/Sekretaris,

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QiA., Ak., CA.,CPAL



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PASCA SARJANA  
JL. DENAI NO. 217 MEDAN 20226 Telp. 061-7334942

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Nama Lengkap : MUSA FERNANDO SILAEN  
N.P.M : 1520050037  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Proposal : SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN  
KREDIT PADA BTPN MITRA USAHA RAKYAT  
CABANG PEMATANGSIANTAR

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Tesis	T. Tanggal
24/2-2018	a. Perbaikan Rumusan Masalah b. Pembahasan dipertjya	
16/3-2018	a. Hasil dan Pembahasan hasil lebih dipergelas b. Kesimpulan dan Saran dikelengkapan c. Urutkan Sumber data penelitian	
18/3-2018	a. perbaikan abstrak b. Pembahasan belum lengkap	
22/3-2018	Bimbingan Seleksi	

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QiA., Ak., CA.,CPAL

Dr. Muhyarsyah, SE., M.Si.

Diketahui Oleh,  
Ketua/Sekretaris,

Dr. Widia Astuty, SE., M.Si., QiA., Ak., CA.,CPAL